

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- Hotmaulana, Rofinus, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), Hlm. 45.
- Prakorso, Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Purwoleksono, Didik Endro, 2019, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sriwidodo, Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta
- Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Rajagrafindo, Depok
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajagrafindo Persada, Depok
- _____, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Repubkik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- _____, Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana/KUHP
- _____, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP
- _____, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

_____, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

_____, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

_____, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

_____, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

_____, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

_____, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

KARYA ILMIAH

Jurnal

Huzaini & Yuherawan, 2021, *Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol 4, No. 1, [Kedudukan Hukum dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan | Huzaini | Widya Yuridika: Jurnal Hukum \(publishing-widyagama.ac.id\)](https://doi.org/10.32492/yusticia.v8i1.291)

Husni, M. Luthfi, 2019, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*, Justicia Journal, Vol. 8 No.1, <https://doi.org/10.32492/yusticia.v8i1.291>

Fachtu Robbi Almalik, 2022

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Ilyas, Andry, 2021, *Implementasi Kebijakan Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Polresta Padang*, SOUMATERA LAW REVIEW, Vol. 4, No. 1, [Implementasi Kebijakan Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Polresta Padang | Soumatera Law Review \(lldikti10.id\)](#)
- Kaligis Rovani, 2013, *Fungsi Penyelidikan dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Lex Crimen, Vol II, No. 4, Agustus [FUNGSI PENYELIDIKAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA | Kaligis | LEX CRIMEN \(unsrat.ac.id\)](#)
- Laksana, Andri Winjaya, 2017, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari – April, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1644/pdf>
- Setiawan, Edy, Syawal Abdulajid, dan Anshar, 2021, *Penerapan Sistem Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Ternate*, Hermeneutika, <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Rahardjo Satjipto, 2007, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Nomor 1-6 Tahun X/10/,
- Widijowati, Rr. Dijan dan Restu Adhie Charisma, 2020, *Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, NCOLS : Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, [PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP DELIK BIASA/LAPORAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA | Widijowati | National Conference on Law Studies \(NCOLS\) \(upnvj.ac.id\)](#)

Skripsi

- Yunindia, Richa, 2018, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Terhadap Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Zebua, Rahmaeni, 2014, *Analisis Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

SUMBER LAINNYA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2009, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*, Jakarta

Rahayaan, Moh. Isa Ansori, *Penghentian Penyelidikan dan Implikasi Hukumnya bagi Pelapor*, diakses dari Kompasiana.com, pada 3 Juli 2022, Pukul 11.07 WIB